



PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI

LAPORAN SEMESTER I

PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan Gardu Pasti Semester I ini dapat kami selesaikan. Hal ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menyelesaikan permasalahan pengaduan yang berkaitan dengan perizinan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Substansi Pengendalian khususnya Sub Substansi Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan “GARDU PASTI” ini merupakan hasil tindak dan penyelesaian permasalahan penanganan pengaduan perizinan di Semester I yang kami sajikan berupa data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui bentuk saluran pengaduan berupa Instruksi Pimpinan, Korespondensi, Formulir Pengaduan, Website, Email, IG, Telepon Kantor, SMS/WA serta Situs Media Online.

Demikian Laporan Semester I ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwakarta, 30 Juni 2022

Koordinator Substansi Pengendalian

Sub Koordinator Substansi Pengaduan

Rd. Heri Lukman Yusup, SH
NIP. 19651017 199302 1 001

Lingga Kencana, S.Pd
NIP. 19790201 200901 2 001

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Hariman Budi Anggoro, ST, MT
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I

PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. MAKSUD DAN TUJUAN..... 1

 C. DASAR HUKUM..... 2

 D. RUANG LINGKUP 2

BAB II

GAMBARAN UMUM 3

 A. PROFIL 3

 1. Visi Dan Misi..... 3

 2. Tugas Pokok Dan Fungsi 3

 3. Maklumat 4

 4. Motto..... 4

 5. Susunan Organisasi 4

 6. Kewenangan 4

 B. SUMBER DAYA..... 5

 1. Sumber Daya Manusia 5

 2. Anggaran 6

 3. Sarana Dan Prasarana 6

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN..... 8

 A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN 8

 1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan 8

 2. Penanganan Pengaduan Perizinan Per Saluran Pengaduan 8

 3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2022..... 10

 B.HAMBATAN..... 15

 C.UPAYA PENYELESAIAN..... 15

BAB III

PENUTUP..... 16

 A. KESIMPULAN 16

 B. SARAN..... 16

DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

..... 17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, maka Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat dalam melakukan Pelayanan.

Pelayanan publik adalah merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dapat berupa barang, jasa atau pelayanan administratif. Dimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, dalam rangka negara memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan publik. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Menyikapi harapan, tuntutan dan juga untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya Kabupaten Purwakarta, maka dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Purwakarta dan kemudian menjadi DMPTSP untuk memenuhi faktor- faktor kebutuhan manfaat pelayanan publik disetiap daerah, memberikan pelayanan administratif perijinan yang berkualitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan disusun dengan maksud dan tujuan:

- Untuk mewujudkan kepuasan pelayanan perizinan kepada masyarakat
- Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan

- Menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola penanganan pengaduan perizinan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.
- Membangun sistem pengelolaan pengaduan secara terintegrasi.

C. DASAR HUKUM

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- ❖ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan di Sub Substansi Pengaduan diantaranya :

- ❖ Masyarakat sebagai penerima layanan publik;
- ❖ Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perizinan;
- ❖ Kelembagaan dan Sarana Pengaduan Pelayanan Perizinan;
- ❖ Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Perizinan;

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. PROFIL

Pada era digital ini banyak hal yang berubah diantaranya percepatan informasi, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya kolaborasi dan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melakukan sejumlah perubahan dalam pelayanan publik.

1. Visi Dan Misi

VISI

Mewujudkan Purwakarta Istimewa

MISI

- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial.
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional.
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

- Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan penanaman modal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Sub Substansi Pengaduan, sumber daya manusia masih sangat terbatas, anggaran maupun sarana dan prasarana. Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Sub Substansi Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi.

Adapun kompetensi sumber daya manusia, terdiri atas :

- Sub Koordinator Sub Substansi Pengaduan merupakan pengendali atas pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- Pengelola Pengaduan Publik merupakan petugas yang mengelola data pengaduan dengan melaksanakan pelayanan pengaduan dan melaksanakan penanganan pengaduan serta Menyusun rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan public secara berkala.
- Petugas Pengelola Mal Pelayanan Publik bertugas menerima aspirasi pengaduan pelayanan publik, memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan dan menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Tabel 1 : Komposisi Substansi Pengaduan Berdasarkan Jabatan

NO	FUNGSI		JUMLAH
1	Sub Koordinator		1 Orang
2	Pelaksana	Analisis Pengaduan Publik	-
		Pengelola Pengaduan Publik	1 Orang
3	Petugas	Pengelola Pengaduan MPP	2 Orang

2. Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan tidak bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta melainkan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nama Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.480.000,- tetapi di Semester I ini belum di realisasikan.

Tabel 2 : Alokasi Anggaran Penanganan Pengaduan

SEMESTER	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) s.d SEMESTER I	PERSENTASE (%)
I	2022	69.480.000	-	-

3. Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menyediakan layanan “**GARDU PASTI**” (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), yang diantaranya :

- Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta.
- Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat dimasukkan ke dalam kotak saran/pengaduan di tempat layanan tersedia atau ditujukan ke alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jl. Veteran No. 139 Kabupaten Purwakarta.
- Mengisi formulir GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta.
- Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id
- Website MPP Bale Madukara : mpp.purwakartakab.go.id
- E-mail DPMPTSP : ptsppurwakartakab@gmail.com
- E-mail MPP Bale Madukara : mppmadukara@gmail.com
- E-mail Pengaduan : pengaduanptsp139@gmail.com
- IG DPMPTSP : [dpmptsp.purwakarta](https://www.instagram.com/dpmptsp.purwakarta)
- IG MPP Bale Madukara : [mppmadukara](https://www.instagram.com/mppmadukara)
- Situs Media Online

- Saluran langsung pada telepon kantor (0264) 8224794
- SMS Gateway Pengaduan / Whatsapp (0818 09898222)
- Rapat Koordinasi
- Instruksi Pimpinan

Dan di dukung juga oleh sarana dan prasarana, antara lain :

Tabel 3 : Sarana Pendukung Pengaduan

NO	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI
1	Komputer	2017	1 unit	Baik
2	HP Pengaduan	2020	1 unit	Baik
3	Formulir Pengaduan	2022	20 berkas	Baik

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan

Substansi Pengendalian sub Substansi Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dari mulai tanggal 1 Januari s.d 30 Juni 2022 telah menerima pengaduan sebanyak 13 permasalahan dengan status penanganan pengaduan perizinan sebagai berikut :

Tabel 4 : Status Penanganan Pengaduan Perizinan

NO	STATUS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Selesai	13	100 %
2	Proses	0	0%
JUMLAH		13	100%

Diagram Status Penanganan Pengaduan Perizinan

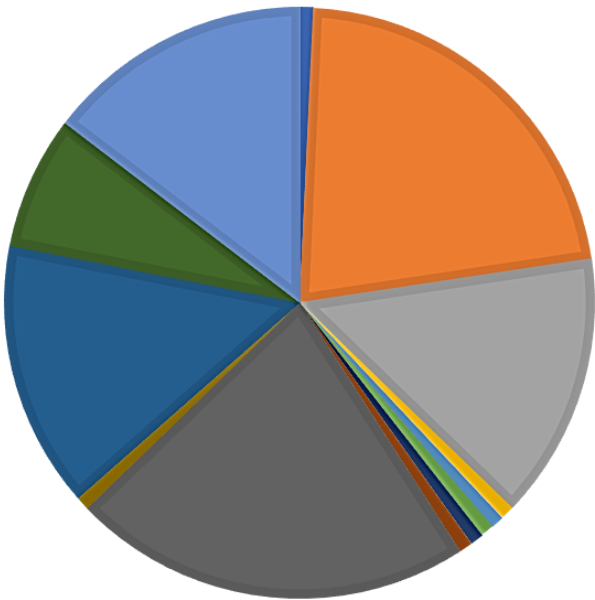


2. Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPTSP per saluran selama kurun waktu tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram dibawah ini :

Tabel 5 : Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

NO	SALURAN PENGADUAN	JUMLAH
1	Tatap muka	-
2	Korespondensi / surat menyurat	3
3	Formulir Pengaduan	2
4	Website DPMPTSP	-
5	E-mail DPMPTSP	-
6	E-mail MPP Bale Madukara	-
7	Instagram (IG) DPMPTSP	-
8	Instagram (IG) MPP Bale Madukara	-
9	Situs Media Online	3
10	Telepon Kantor	-
11	SMS / Whatsapp	2
12	Rapat Koordinasi	1
13	Instruksi Pimpinan	2
	JUMLAH	13



3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2022

Tabel 6 : Penanganan Pengaduan Perizinan

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
1	04-01-2022	Surat	Soleh	PT. Putra Naga Indotama	Kp. Cibogo RT. 009 RW. 003 Desa Campaka Kecamatan Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Adanya keluhan warga yang tinggal berdekatan dengan PT. PNI pasca terjadinya kebakaran tahun 2019, warga mempertanyakan jarak / jalan inspeksi disekeliling pabrik guna mencegah terjadinya kebakaran pada masa yang akan datang.	19-01-2022	11		V	Inspeksi lapangan	1. Telah dilaksanakannya survey lapangan antara tim teknis dengan warga. 2. Sebagian warga tidak mengetahui adanya kesepakatan antara kepala desa / Ketua Bamsdes dengan PT. PNI yang ditandatangani pada tanggal 09 Juni 2020 3. Berdasarkan hasil survey lapangan disepakati bahwa warga KP. Cibogo RT. 009/RW. 003 menerima keputusan tim terkait jarak dan isi dari surat pernyataan yang telah dikeluarkan oleh PT. PNI dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua Bamsdes sesuai dengan No. BAP : 01/Pengda/II/2022 Tanggal 19 Januari 2022	1. PT. PNI sudah membuat jaringan hydrant disekeliling kawasan pabrik 2. Telah adanya kesepakatan antara PT. PNI dengan warga sesuai dengan Surat Pernyataan No : 001/SP-HRD/PNI-PWK/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 3. Surat keberatan warga dari Bpk. Soleh kepada PT. PNI dinyatakan tidak berlaku dan dianggap telah selesai secara musyawarah/mufakat	V			
2	12-01-2022	Form Pengaduan	M. Alfiansyah (Ai Sobariah)	Perumahan Villa Grand Cikao (VGC)	Desa Kadumekar Kecamatan Babakanikao Kabupaten Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Perumahan Villa Grand Cikao (VGC) yang beralamat di Babakanikao Kadumekar, sampai saat ini belum bisa di huni (sudah akad) cicilan sudah dibayarkan, untuk jalan, tanggul, listrik, sanyo belum di selesaikan	14-01-2022	2	V		Komunikasi	Ada surat keterangan berupa kesepakatan antara Konsumen Developer-BTN atas dasar Surat Keterangan Hasil Rapat Tanggal 14 Januari 2022 yang berisi : 1. Bulan Pebruari tanggul pengaman dari Cikarum oleh Developer 2. 24 Januari 2022 PLN akan memasang listrik konsumen 900 Watt 3. Januari Akhir jalan di situ dulu sekalian permanen	Pengaduan di cabut, karena sudah ada kesepakatan antara Konsumen-Developer-BTN atas dasar Surat Keterangan Hasil Rapat Tanggal 14 Januari 2022, sudah ada kesepakatan dan titik temu antara pelapor dan pihak yang diadukan.	V			
3	27-01-2022	Form Pengaduan	Maman Purnama	Waralaba Alfa Mart	Desa Gandasoli Kecamatan Plered Kab. Purwakarta	Perizinan dan Non Perizinan	Adanya Pembangunan dan Operasional Waralaba di Desa Gandasoli Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang tidak melalui proses musyawarah dengan warga masyarakat karena terdampak ekonomi bagi UMKM / warung kecil di sekitar TKP	07-02-2022	5	V		Koordinasi dan pengumpulan data dan memanggil pihak pemohon atau pengadu	Memanggil pihak pengadu untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Ruang Rapat Substansi Perizinan dan dijelaskan bahwa data perizinan waralaba Alfa Mart tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan sudah ada persetujuan dari warga sekitar	Dimohon agar pihak pengadu berkoordinasi dahulu dengan pihak warga dan perangkat desa terkait	V			
4	31-01-2022	Surat No. 511/139/Perdag-DKUPP Tgl. 31-01-2022	DKUPP	Toko Modern (Alfa Mart, Alfa Midi dan Indomaret)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPKP)	Pelaksanaan Penanaman Modal	Penerapan sanksi administratif atas Penegakan Pelanggaran terhadap Perda No. 14/2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah Purwakarta (jam operasional buka tutup toko)	31-01-2022	1	V		Koordinasi dan Rapat Pembahasan	DKUPP melakukan pengawasan dan terdapat pelanggaran jam operasional beberapa mini market yang berlokasi di wilayah sekitar Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Plered	Akan di lakukan sidang insidental gabungan dengan OPD teknis di tanggal 2 Februari 2022	V			
5	02-02-2022	Hasil Rapat Koordinasi	DKUPP	Toko Modern (Alfa Mart, Alfa Midi dan Indomaret)	Wilayah Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Plered	Perizinan dan Non Perizinan	Sidak Pengawasan Insidental ke Toko Modern Alfa Mart, Alfa Midi dan Indomaret	02-02-2022	1	V		Sidak Insidental dan pemasangan stiker pengawasan oleh Petugas Satpol PP	Melaksanakan Sidak ke 5 titik di wilayah Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Plered serta memberikan teguran dan pemasangan stiker waktu jam operasional bagi Toko Modern Alfa Mart, Alfa Midi dan Indomaret yang telah melanggar Perda No. 14/2012	Di pasang stiker jam operasional di setiap toko tersebut dan pengawasan selanjutnya ada di DKUPP	V			
6	08-02-2022	WA Gardu Panti	M. Alfiansyah (Ai Sobariah)	Perumahan Villa Grand Cikao (VGC)	Desa Kadumekar Kecamatan Babakanikao Kabupaten Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluhan warga Perumahan Villa Grand Cikao (VGC) yang diantaranya : 1. Listrik yang belum terpasang 2. Jalan yang masih belum di aspal 3. Tanggul penahan banjir luapan air sungai masih belum efektif (perlu ditinggikan)	09-02-2022	1	V		Rapat Pembahasan	Tanggal 09 Pebruari 2022 Memanggil pihak Developer untuk dimintai keterangan terkait keluhan warga Perumahan VGC di Ruang Kerja Koordinator Pengendalian sesuai dengan No. BAP : 02/Pengda/II/2022 Tanggal 9 Pebruari 2022, hasil pembahasan :	1. Infrastruktur jalan akan terus diperbaiki apabila ada kerusakan dan akan di selesaikan setelah tidak ada lagi pembangunan				

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
													1 Pihak Developer VGC mengakui belum memenuhi sarana prasarana fasos fasum bagi warga Perumahan VGC 2 Pihak Developer siap bertanggungjawab memenuhi sarana prasarana fasos fasum bagi warga Perumahan VGC 3 Di tanggal 9 Pebruari 2022 telah ada kesepakatan antara pihak PLN dengan warga terkait pemasangan listrik bagi konsumen perumahan VGC	2 Akan ada pemasangan listrik di minggu kedua-ketiga di Bulan Pebruari 2022 3 Tanggal 15 Februari 2022 Peninjauan dan pengecekan lapangan ke lokasi Perumahan Vila Grand Cikao oleh Bapak Koordinator Pengendalian DPMPTSP dan benar adanya untuk sebagian rumah warga listrik telah terpasang	V			
7	25-02-2022	Instruksi Pimpinan	Pembahasan pembangunan budidaya ras ayam pedaging di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta	Bangunan kandang budidaya ayam ras pedaging di Kp. Pangkalan RT. 010 RW. 003 Desa/Kelurahan Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta	Ruang Kerja Kepala DPMTSP	Perizinan dan Non Perizinan	Adanya kegiatan pembangunan kembali kandang ayam milik Saudara Ir. Alsiner Banjarnahor dan telah melanggar Perda No. 11/2012 tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031	01/03/2022	1	V		Rapat Pembahasan dengan OPD Teknis	Rapat membahas tentang pembangunan budidaya ayam ras pedaging di Ruang Kerja Kepala DPMTSP dengan hasil adanya kesepakatan untuk Langkai hukum penindakan diantaranya : 1 Bagian Hukum agar mengkaji aspek hukum terkait pembongkaran 2 DPUTR agar membuat surat perintah pembongkaran 3 Setelah 30 hari surat perintah pembongkaran pelaku usaha tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran bangunan kandang dilakukan oleh Satpol-PP atas biaya pemilik bangunan kandang.	Pihak DKUPP memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada mini market yang melanggar jam bukafutup toko di luar ketentuan yang berlaku serta akan diadakannya sidang gabungan dengan OPD teknis terkait pada tanggal 02 Pebruari 2022 Menerima Laporan Hasil Monitoring Toko Modern dari DKUPP pada tanggal 07 Pebruari 2022 dan Pihak DKUPP akan melakukan pemantauan secara berkala Tanggal 09 Maret 2022, DPUTR mengirimkan surat kepada Sdr. Ir. Alsiner Banjarnahor untuk melakukan pembongkaran bangunan kandang ayam di lokasi yang dimaksud dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Peraturan Bupati No. 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 105.	V			
8	07/03/2022	Media Online bhayangkasatans.com	https://bhayangkasatans.com/tinjau-perusahaan-asing-gudang-produksi-garmen-tersebut/17 FEBRUARI 2022	Pemberitaan media elektronik yang memberitakan adanya izin gudang perusahaan asing tersebut di Jl. Miller Desa Darangdan Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta	CV. SOLVI INDONESIA Jl. Miller Ds. Darangdan Kec. Darangdan Kab. Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Ada perusahaan asing tersebut yang beroperasi tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya	07/03/2022	1			Pemeriksaan Lapangan	1 Melaksanakan pemeriksaan lapangan gabungan bersama dengan OPD teknis 2 Perusahaan yang dimaksud adalah CV. SOLVI INDONESIA dan telah dilakukan penutupan oleh Pemda pada tahun 2019 tetapi saat ini telah beroperasi kembali 3 Tim akan membahas hasil pengecekan lapangan dan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan 4 Pihak manajemen CV. SOLVI INDONESIA telah berubah kepemilikan Hasil Pembahasan : 1 Perizinan yang dimiliki CV. SOLVI INDONESIA yang diterbitkan oleh DPMTSP adalah izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Gedung dan Kantor dengan No : 503/IMB.251-DPMTSP/2018 Tanggal 28-06-2018	Akan memanggil pemilik perusahaan untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut 1 Pemmasalahan terkait CV. SOLVI INDONESIA agar disampaikan ke masing-masing pimpinannya sebagai bahan laporan dan pengambilan keputusan ibu Bupati				

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
													2 Tahun 2019 pernah dilakukan penutupan sementara oleh pihak Pemda karena CV. SOLVI INDONESIA telah melanggar izin yang telah diterbitkan dikarenakan tidak sesuai peruntukan dengan izin yang dikeluarkan 3 Perizinan harus dikembalikan ke fungsi awal sebagai gudang dan perkantoran serta harus sesuai dengan RTRW 4 Pemohonan izin yang diajukan pemohon harus sesuai dalam pelaksanaannya dan bangunan yang belum memiliki izin harus segera mengajukan IMB/PBG dan perkasanya 5 Pihak Kecamatan berharap ada solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi 6 Ada solusi terbaik untuk tenaga kerja karena dampak penutupan perusahaan dan Kades memohon untuk melakukan revisi/peubahan terhadap peruntukan tata ruang di sepanjang Jl. Miller 7 Disarankan untuk membuat kebrmpok industry kecil sesuai dengan ketentuan Pemda No. 11/2012 dimana penentuan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan dan perizinannya dilakukan oleh masing-masing kebrmpok/perorangan 8 Ketika ada penutupan diharapkan CV. SOLVI memberikan kompensasi kepada karyawan	2 Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan CV. SOLVI INDONESIA ke Kepala DPUPR Kabupaten Purwakarta agar OPD teknis yang menbidangi sektor terkait melakukan tindakan penerbitan terkait pelanggaran yang dilakukan CV. SOLVI INDONESIA	V			
9	31/03/2022	Instruksi Pimpinan	Warga Masyarakat	CV. JB. Fiber / P.T. Interia Indo Kreasi	KP. Cintakarya RT. 011 / RW. 005 Desa Cikopo Kec. Bungursai Kab. Purwakarta	Perizinan dan Non Perizinan	CV. JB. Fiber beroperasi tetapi belum memiliki izin NIB	31/03/2022	1	V		Koordinasi dan Pemeriksaan Lapangan Gabungan	Melakukan Koordinasi dengan Distrik dan Satpol PP untuk penjaminan persepsi dan tindak lanjutnya dengan hasil akan dilakukan pemeriksaan lapangan ke perusahaan tersebut	Melakukan pemeriksaan lapangan gabungan bersama OPD teknis dan pengecekan berkas NIB serta site plan dengan hasil perizinan yang di adukan oleh warga telah selesai di proses dan telah sesuai dengan peruntukannya	V			
10	04/04/2022	Surat	Keua RT.08/RW.02 Kel. Munjul Jaya	Bapak Sukanto	RT.35/RW.03 Kel. Munjul Jaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Menolak Perpanjangan Ijin Menara Telekomunikasi/BTS	07/04/2022	3	V		Koordinasi	Melakukan koordinasi dengan Kasi Perizinan II dan Kasi Pengawas Satpol IPP dengan hasil bahwa permasalahan tersebut telah selesai di tindak lanjut oleh Satpol IPP		V			
11	26/04/2022	Media Online	https://www.sinarjabar.com/daerah/pr-2913278959/perumahan-villa-grand-cikao-purwakarta-diterjang-banjir	Perumahan Villa Grand Cikao	Desa Kadumekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta	Pelaksanaan Penanaman Modal	Tindak lanjut permasalahan Perumahan Villa Grand Cikao (VGC)	05, 07 dan 12-05-2022	5	V		Peninjauan lokasi	Tanggal 05 dan 07 Mei 2022 Kepala DPMP TSP meninjau langsung lokasi perumahan dan sekitarnya yang terdampak banjir bandang	Permasalahan ini selanjutnya di tangani oleh DPRD Kab. Purwakarta. Tanggal 12 Mei 2022 Tindak lanjut permasalahan Perum VGC : https://trendpurwakarta.com/2022/05/12/komisi-iii-dprd-purwakarta-lakukan-hearing-dengan-pengembang-perumahan-villa-grand-cikao/	V			

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
12	01/06/2022	Pesan Whatsapp	Setiadi	PT. AWSI atau Pabrik yang di peruntukan untuk gudang hasil pertanian di gunakan untuk industri perakitan kabel	KP. Cibulao Ds. Grende Kec. Campaka Kab. Purwakarta	Perizinan dan Non Perizinan	Pesan Singkat Whatsapp Gardus Pasti, Perihal keluhan dari sdr. Setiadi terkait pabrik kabel yang masih berproduksi padahal sudah ditutup oleh Satpol PP serta menyalahi aturan zonasi karena bangunan yang dipergunakan tidak sesuai peruntukan pada IMB serta dipergunakan untuk industri perakitan kabel (Wiring Harness)	8 Juni 2022 (Melaksanakan pemeriksaan lapangan ke PT. AWSI)	2	V		8 Juni 2022 (Melaksanakan pemeriksaan lapangan ke PT. AWSI)	1 Sesuai dengan apa yang dilaporkan terdapat aktivitas di Pabrik tersebut berupa perakitan kabel padahal sebelumnya pabrik telah di segel dan ada kesepakatan untuk tidak beroperasi selama perizinannya belum selesai di tempuh 2 Ada sekitar ± 10 Orang yang sedang melakukan aktivitas perakitan kabel 3 No Berita Acara Pemeriksaan : PBN01/C/VV/2022 Tanggal 8 Juni 2022	1 DPMPSTP akan menyampaikan secara tertulis kondisi di lapangan kepada DPUPR 2 Diharapkan agar DPUPR melakukan kajian untuk tindakan selanjutnya 13 Juni 2022 Memanggil Direktur PT. AWSI untuk dimintai keterangan terkait hasil pemeriksaan lapangan ke PT. Adidaya Wiring System Indonesia (AWSI) pada tanggal 8 Juni 2022, dengan kesimpulan : 1 Pemerintah menghimbau agar PT. AWSI mengembalikan kembali fungsinya sesuai dengan perizinan awal yaitu gudang penyimpanan hasil pertanian dan perkebunan serta segera menghentikan kegiatannya dengan menutup perusahaan dan mengajukan perizinan yang baru 2 PT. AWSI bersedia membuat perizinan yang baru bila saudara Setiadi sudah mencabut perizinan yang lama 3 DPMPSTP akan membuat surat yang ditujukan ke OPD teknis agar dapat melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai kewenangannya	V			
13	21/06/2022	Berita Media Online mitrabangsa.id	https://mitrabangsa.id/serpat-diberhentikan-pembangunan-yayasan-ti-praja-karya-utama-kembali-dilanjutkan/	Gedung Kampus Universitas Mitra Karya	Berita Online dari Media Mitrabangsa.id pada tanggal 21 Juni 2022	Perizinan dan Non Perizinan	Pembangunan Yayasan Ti Praja Karya Utama sempat diberhentikan oleh Satpol PP tetapi sekarang berjalan kembali padahal perizinannya belum beres	28 Juni 2022	5	V		Pemeriksaan lapangan	27 Juni 2021 Menyampaikan surat ke Dinas teknis untuk bersama sama melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 28 Juni 2022 ke Pembangunan Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Ti Praja Karya Utama di Desa Wanaseri Kecamatan Wanayasa Melaksanakan pemeriksaan lapangan gabungan dengan OPD teknis ke pembangunan gedung Perguruan Tinggi Swasta di Desa Wanaseri Kecamatan Wanayasa sesuai No Berita Acara Pemeriksaan (BAP) : PBN02/C/VV/2022 Tanggal 28 Juni 2022, dengan hasil : 1 Pemilik Yayasan atau penanggung jawab Yayasan tidak berada di lokasi yang ada hanya pihak penjaga saja 2 Pihak Yayasan membangun gedung perguruan tinggi tanpa adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya 3 Diharapkan pihak yayasan untuk segera menghentikan aktivitas pembangunan gedung	28 Juni 2022 1 Pihak pengelola atau penanggungjawab pembangunan gedung mendatangi kantor DPMPSTP untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut, dengan hasil pembahasan : 2 Pihak yayasan mengira semua bentuk petizinan telah selesai di urus oleh pengelola yang lama dan sudah tidak bermasalah sehingga mereka memutuskan untuk membangun gedung Pihak Yayasan harus segera memproses perizinan berbasis risiko melalui Sistem OSS RBA 3 Harus melengkapi dokumen perizinan berdasarkan ketentuan PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 4 4 Harus segera mengajukan pengesahan sileplan dan rekam-rekam teknis ke dinas terkait	V			

NO	TANGGAL PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
													4 Disarankan segera mengurus perizinan ke dinas teknis dan melengkapi perizinan yang diantaranya meliputi PKKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG dan SLF 5 Untuk menjaga ketertarikan dan ketertiban umum dengan wilayah sekitar diharapkan berkoordinasi dengan pihak desa					

KETERANGAN :

1. SELESAI	: 13
2. BELUM SELESAI	: 0
3. TIDAK SELESAI	: 0
TOTAL	: 13

-

KOORDINATOR SUBSTANSI PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

RD. HERLIUKMAN YUSUP, SH
NIP. 19651017 199302 1 001

Mengetahui :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN SUDIANGGORO, ST, MT
NIP. 19790603 200301 1 013

Purwakarta, 30 Juni 2022
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

LINGGA KENCANA, S, Pd
NIP. 19790201 200901 2 001

B. HAMBATAN

Hambatan dalam pelaksanaan penanganan permasalahan pengaduan di Semester I tahun 2022 diantaranya yaitu :

1. Kurang optimalnya Penanganan Pengaduan Perizinan dalam pelaksanaan sosialisasi pengenalan media Penanganan Pengaduan Perizinan sehingga banyak masyarakat atau pelaku usaha yang tidak mengetahui;
2. Kurangnya staf dan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan;
3. Belum adanya pelatihan khusus terkait Penanganan Pengaduan Perizinan.
4. Kanal pengaduan yang dikelola belum sepenuhnya optimal.
5. Pengaduan yang diterima tidak terkait dengan masalah perizinan dan non perizinan.

C. UPAYA PENYELESAIAN

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penanganan pengaduan diantaranya:

1. Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengoptimalan anggaran;
2. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media;
3. Membentuk tim khusus di internal DPMPTSP dan Tim Gabungan dengan instansi teknis terkait;
4. Telah tersedianya kanal GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara;
5. Melakukan koordinasi secara rutin terkait validasi data pengaduan oleh masing-masing petugas layanan pengaduan;
6. Mekanisme koordinasi dengan OPD teknis dilakukan melalui mekanisme rapat tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penanganan Pengaduan Perizinan ini ditangani oleh Substansi Pengendalian sub Substansi Pengaduan, sub Substansi Perizinan beserta Tim Teknis terkait.

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan Semester I di tahun 2022 sebanyak 13 permasalahan dengan status permasalahan **Selesai**.

B. SARAN

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan ini menyajikan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan selama satu 1 semester yang memuat atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah tercapai di semester awal tahun 2022 serta merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Substansi Pengaduan ke depannya.

Pelaksanaan layanan publik yang diberikan diharapkan dapat terus di pertahankan dan di tingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik antar Subtansi Pengaduan dan Substansi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta khususnya petugas layanan informasi, konsultasi dan pengaduan serta petugas dan pejabat back office begitu juga halnya dengan petugas tim teknis dari Dinas yang ditujuk. Selain itu perlu terus dilakukan sosialisasi dan informasi yang berkelanjutan ke masyarakat ataupun pelaku usaha agar usaha atau kegiatan yang dilakukan setiap warga masyarakat sudah dilengkapi izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

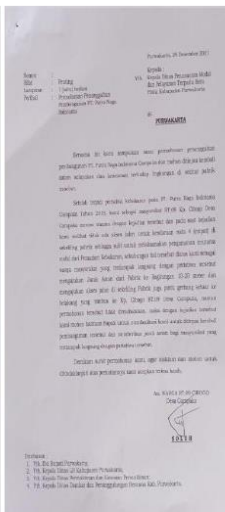
Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

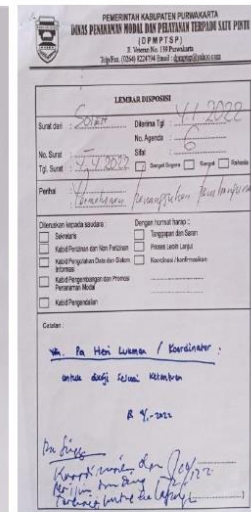
DOKUMENTASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN TRIWULAN I (JANUARI - MARET) TAHUN 2022

PERIHAL PENGADUAN PENANGGUHAN PEMBANGUNAN PT. PUTRA NAGA INDOTAMA
(4 JANUARI 2022)

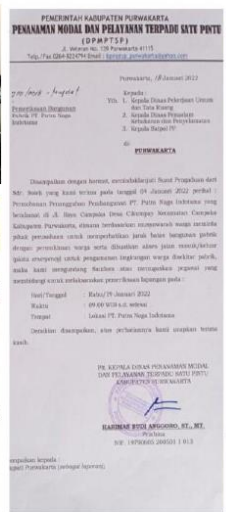


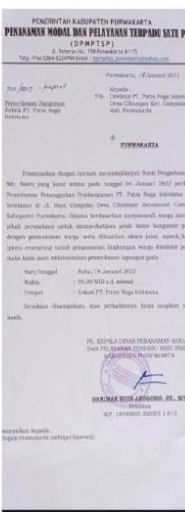












**RAPAT FASILITASI PENGADUAN WARGA KP. CIBOGO RT. 009 RW. 003 DESA CAMPAKA KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN PERWAKILAN DARI PT. PUTRA NAGA INDOTAMA (PNI)
(RABU /19 JANUARI 2022)**



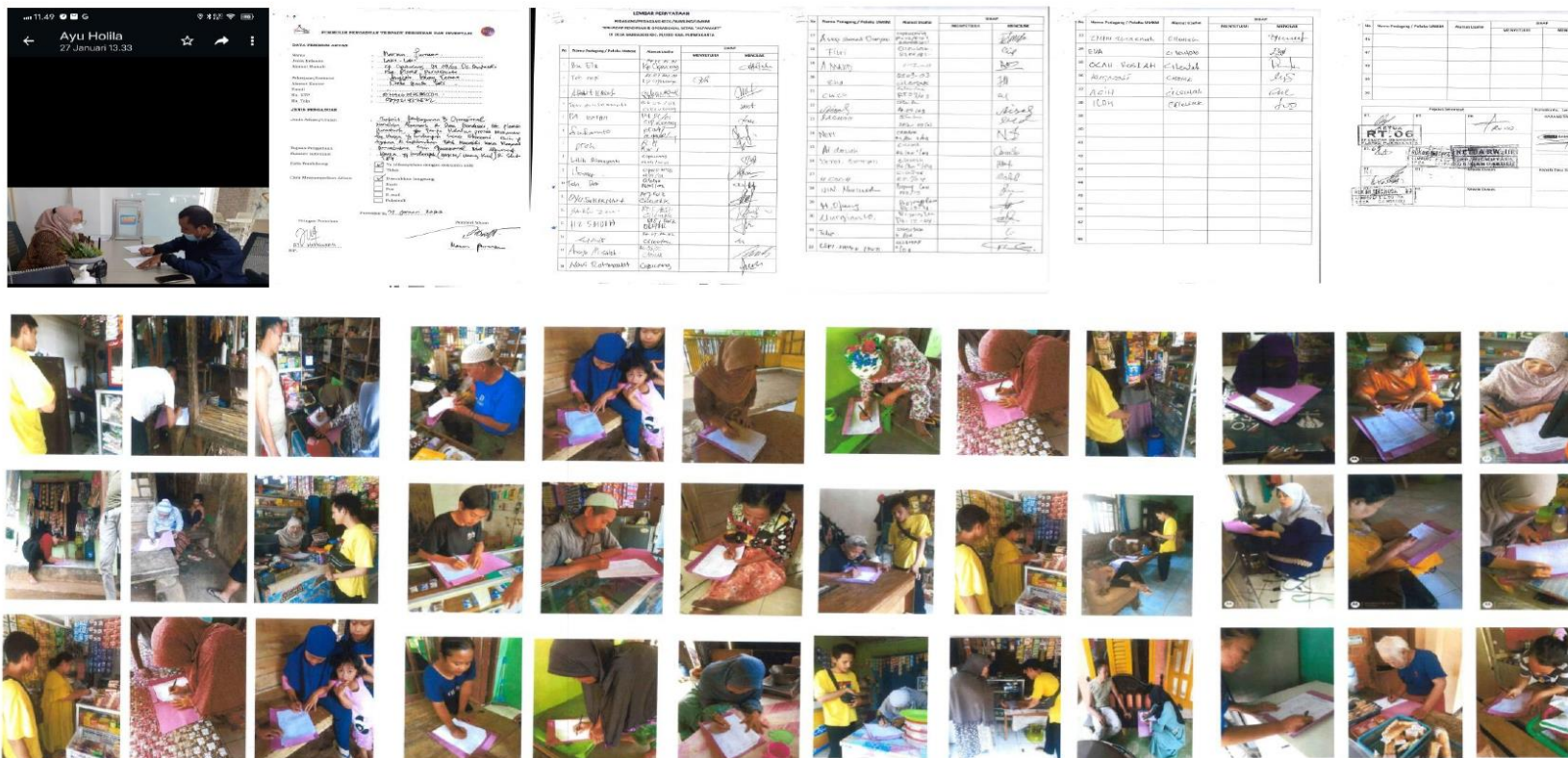
**DOKUMENTASI PEMERIKSAAN LAPANGAN KE LOKASI PT. PUTRA NAGA INDOTAMA (PNI)
PERIHAL FASILITASI PENGADUAN WARGA KP. CIBOGO RT. 009 RW. 003 DESA CAMPAKA KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
(RABU /19 JANUARI 2022)**

**DOKUMENTASI JARINGAN HYDRANT
KAWASAN PABRIK PT. PUTRA NAGA INDOTAMA**



DOKUMENTASI PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MPP BALE MADUKARA

PERHAL PENGADUAN PEMBANGUNAN ALFAMART GANDASOLI
(KAMIS / 27 JANUARI 2022)





**RAPAT DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TERKAIT PENEGAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERDA NO. 14/2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI WILAYAH PURWAKARTA
(SENIN / 31 JANUARI 2022)**



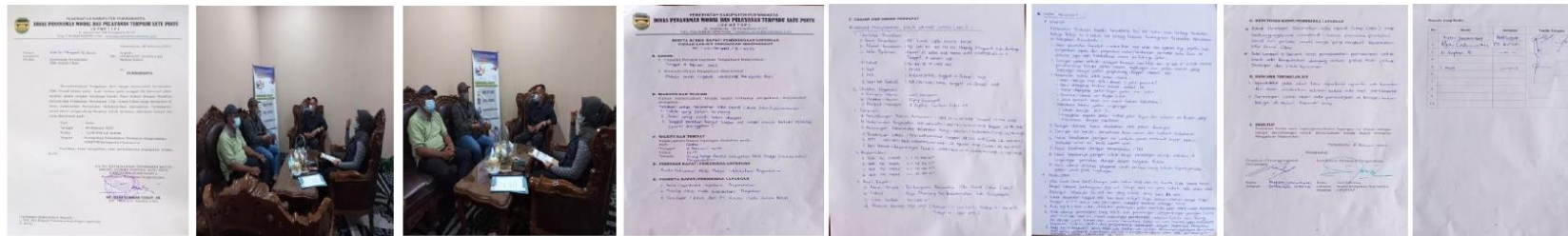
**SIDAK GABUNGAN TERKAIT WAKTU JAM OPERASIONAL TOKO MODERN ALFA MART, ALFA MIDI DAN INDOMARET
DI 5 TITIK WILAYAH KECAMATAN PURWAKARTA SERTA KECAMATAN PLERED
(2 FEBRUARI 2022)**



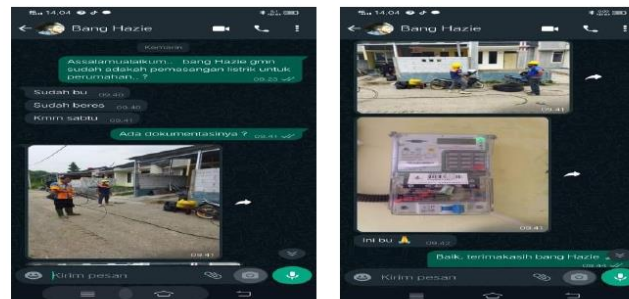
**PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PEMBANGUNAN ALFAMART GANDASOLI
MEMANGGIL PIHAK PENGADU / SDR. MAMAN PURNAMA UNTUK DIMINTAI KLARIFIKASI DAN PENJELASAN TERKAIT PERIZINAN PEMBANGUNAN ALFAMIDI GANDASOLI
(SENIN / 7 FEBRUARI 2022)**



DOKUMENTASI PERIHAL KLARIFIKASI PENYEDIAAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN VILLA GRAND CIKAO (VGC)
(RABU / 9 FEBRUARI 2022)



KONFIRMASI KEPADA PIHAK DEVELOPER TERKAIT PENYEDIAAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN VILLA GRAND CIKAO (VGC)
(RABU / 15 FEBRUARI 2022)



PENGECEKAN LAPANGAN KE PERUMAHAN VILLA GRAND CIKAO (VGC) TERKAIT PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
(RABU / 15 FEBRUARI 2022)



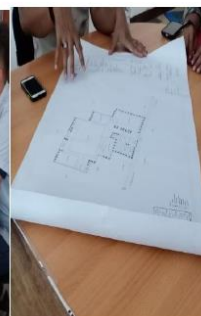
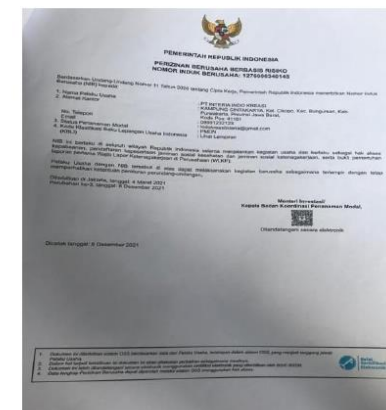
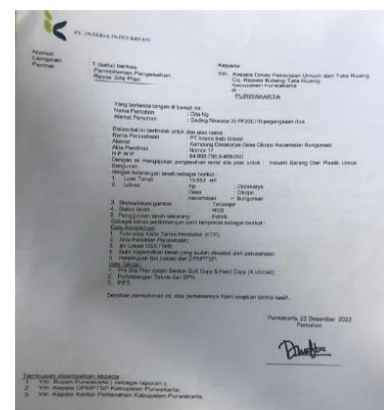
**PENGECEKAN LAPANGAN KE PERUSAHAAN ASING PRODUKSI GARMEN TERSELUBUNG (CV. SOLVI)
JALAN MILITER DESA DARANGDAN KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA
(SENIN / 07 MARET 2022)**



**RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN CV. SOLVI INDONESIA
SENIN / 14 MARET 2022 (RUANG RAPAT DPMPSTP KABUPATEN PURWAKARTA)**

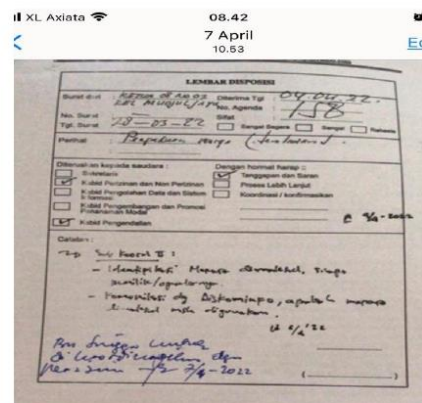
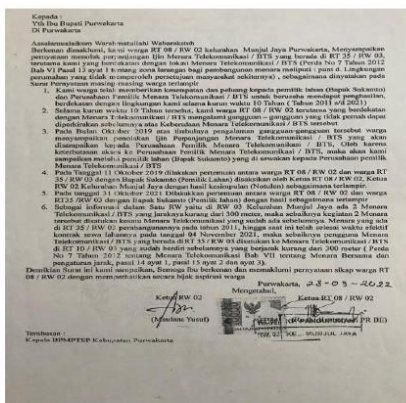
[illegible]

**RAPAT KOORDINASI DI DISTARKIM DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN KE PT. INTERIA INDO KREASI
KP. CINTAKARYA RT. 011 / RW. 005 DESA CIKOPO KEC. BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA
(KAMIS / 31 MARET 2022)**

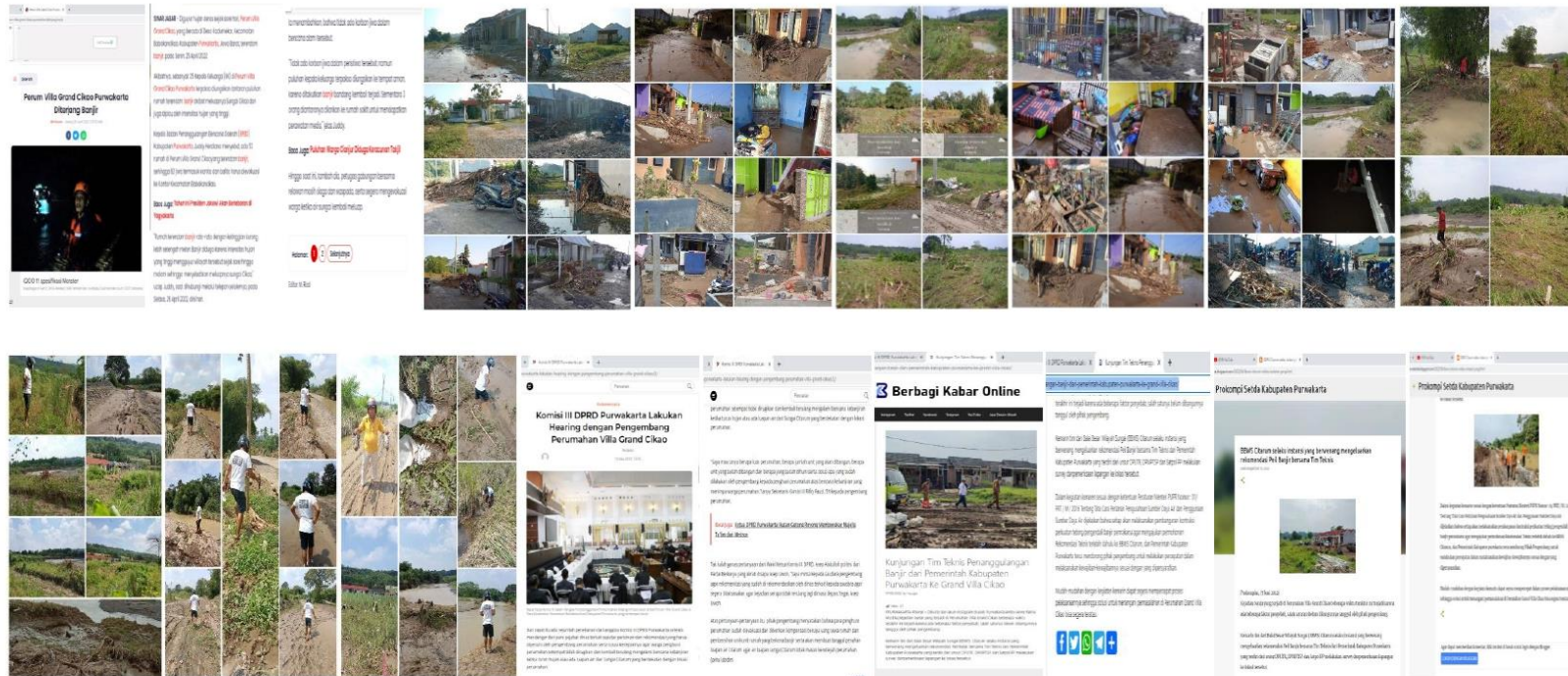


DOKUMENTASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN TRIWULAN II (APRIL - JUNI) TAHUN 2022

**KELUHAN DARI WARGA RT.08 / RW.02 KELURAHAN MUNJUL JAYA PURWAKARTA DAN HASIL KOORDINASI DENGAN KASI PERIZINAN II SERTA SATPOL PP TANGGAL 7 APRIL 2022
PERIHAL TIDAK ADANYA PERSETUJUAN DARI WARGA SEKITAR DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI/BTS**



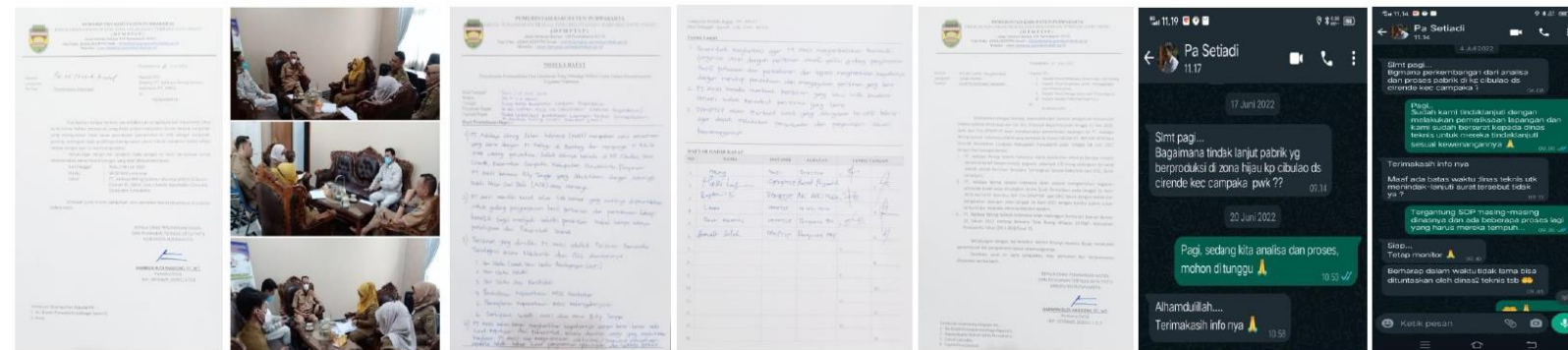
PEMBERITAAN MEDIA ONLINE SINAR JABAR (26 APRIL 2022), CEKLAP KE-I (5 MEI 2022), CEKLAP KE-II (7 MEI 2022) DAN TINDAKLANJUT DPRD SERTA TIM TEKNIS KE PERUMAHAN VILLA GRAND CIKAO (VGC) DESA KADUMEKAR KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA



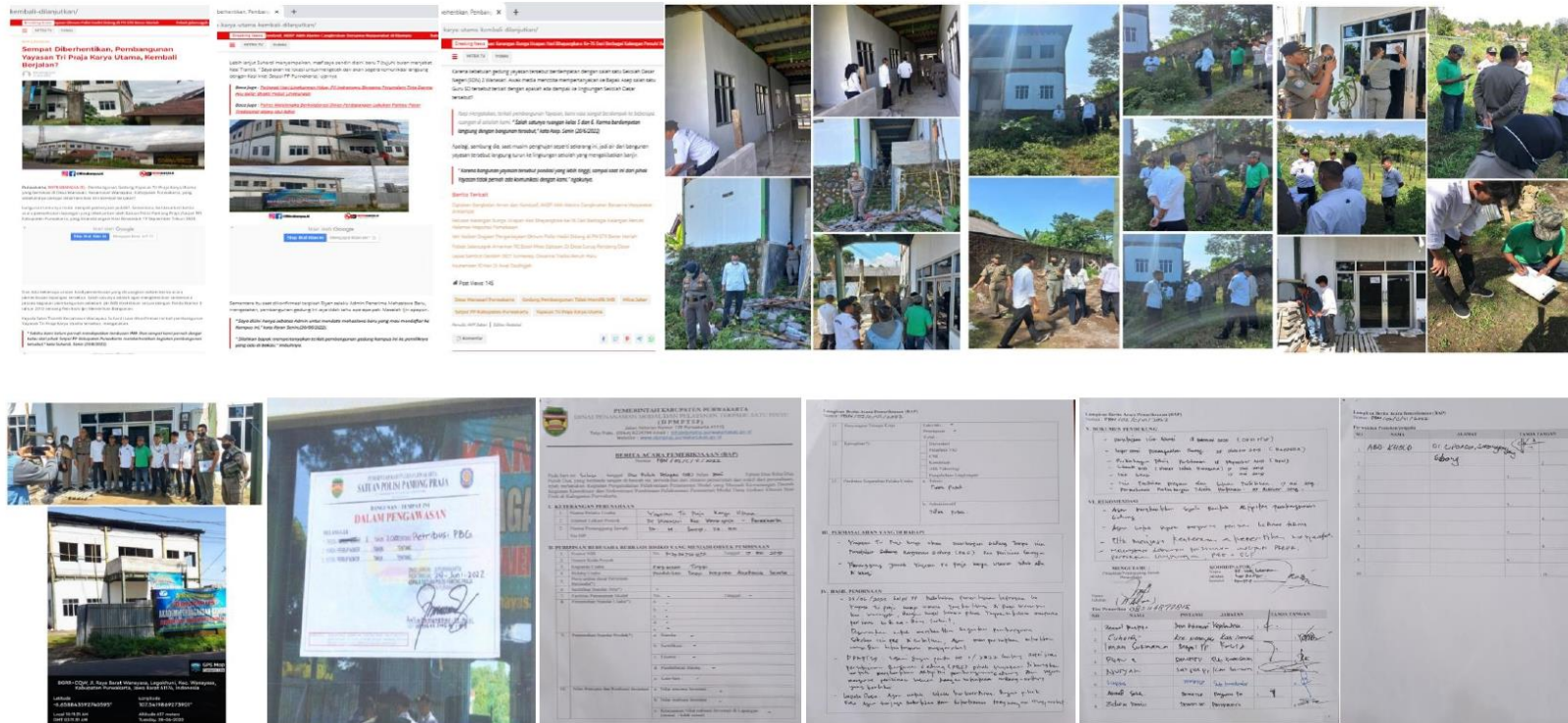
**PEMERIKSAAN LAPANGAN KE PT. ADIDAYA WIRING SYSTEM INDONESIA (AWSI)
DUSUN CIBULAO RT. 008 RW. 003 DESA CIRENDE KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
(RABU / 08 JUNI 2022)**



**RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN PT. ADIDAYA WIRING SYSTEM INDONESIA (AWSI)
SENIN / 13 JUNI 2022
(RUANG KERJA KOORDINATOR PENGENDALIAN DPMPSTP KABUPATEN PURWAKARTA)**



**PEMERIKSAAN LAPANGAN GABUNGAN BERSAMA SATPOL PP KABUPATEN PURWAKARTA
KE PEMBANGUNAN GEDUNG KAMPUS UNIVERSITAS MITRA KARYA YANG DI KELOLA OLEH YAYASAN TRI PRAJA KARYA UTAMA
KP. BABAKAN PAMEUNGPEUK DESA WANASARI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
(SELASA / 28 JUNI 2022)**



[illegible]

The collage consists of 15 photographs and two official documents. The photographs show various scenes of law enforcement activities: a meeting with officials in uniform, a group of officers standing together, a man being escorted by police, a man being searched, a man being interviewed, a man being escorted by police, a man being interviewed, a man being escorted by police, a man being interviewed, a man being escorted by police, a man being interviewed, a man being escorted by police, a man being interviewed, a man being escorted by police, a man being interviewed. The documents are official forms from the Indonesian Ministry of Police, including a 'BUKTI AGAMA' (Religious Proof) form and a 'BUKTI KEMAMPUAN' (Proof of Ability) form.



PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI